

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA UKM UNIT KEGIATAN KEROHANIAN ISLAM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nahdliyatul Islamiyah

(Universitas Negeri Surabaya), nahdliyatul27@gmail.com

Muhammad Turhan Yani

(Universitas Negeri Surabaya), muhammادتurhan@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan demokrasi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Negeri Surabaya. Dalam organisasi ini bukan hanya mengkaji tentang agama Islam saja, tetapi juga menerapkan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia. Demokrasi menyiratkan mengenai arti kekuasaan yang pada hakikatnya rakyat yang memegang amanah tertinggi dalam demokrasi. Hakikat demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dilihat dari arti kata demokrasi sudah jelas bahwa rakyat yang memegang peran penting. Namun, dalam praktiknya bisa dipahami dan dijalankan berbeda-beda, bahkan perkembangan sangat tidak terkontrol. Dalam organisasi UKKI UNESA seharusnya sudah sejalan dengan nilai yang ada dalam demokrasi dan terciptanya kebebasan serta musyawarah mufakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah ketua umum, fungsionaris, dan anggota. Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah implementasi nilai-nilai demokrasi dalam organisasi Unit Kegiatan Kerohanian Islam sudah sejalan dengan prinsip nilai demokrasi pancasila yang mengacu pada teori Cipto, meskipun kurang sempurna. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan turut berkontribusi menyeimbangkan pemikiran mengenai penerapan nilai-nilai demokrasi dan dapat menambah khazanah pemikiran bagi penulis dan pembaca pada umumnya mengenai Nilai-nilai demokrasi.

Kata kunci: demokrasi, organisasi, musyawarah.

Abstract

This study aims to determine the implementation of democracy in the Student Activity Unit of the Islamic Spiritual Activity Unit, State University of Surabaya. In this organization not only examines the religion of Islam but also applies the values of democracy applied in the Indonesian state. Democracy implies the meaning of power which is essentially the people who hold the highest mandate in democracy. The essence of democracy is of the people, by the people and for the people. Judging from the meaning of the word democracy, it is clear that the people play an important role. However, in practice it can be understood and implemented differently, even development is very uncontrolled. In the UKKI UNESA organization, it should be in line with the values that exist in democracy and the creation of freedom and deliberation to reach consensus. The research method used is qualitative. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Informants in this study were the general chairman, functionaries, and members. The conclusion of this study is that the implementation of democratic values in the organization of the Islamic Spiritual Activity Unit is in line with the principles of Pancasila democratic values which refers to Cipto's theory, although it is not perfect yet. The results of this study are expected to be useful and contribute to balancing thoughts on the application of democratic values and can add to the treasures of thoughts for writers and readers in general regarding democratic values.

Keywords: democracy, organization, discussion.

PENDAHULUAN

Kata Demokrasi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan. Sehingga dari dua kata tersebut memiliki arti pemerintahan rakyat. Kata tersebut kemudian diserap menjadi kosakata dalam bahasa Inggris yakni *democracy*. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan yang pada hakikatnya rakyat yang memegang amanah tertinggi dalam demokrasi. Makna dari demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

rakyat. Dilihat dari arti demokrasi sudah jelas bahwa rakyat yang memegang peran penting. Namun dalam praktiknya bisa dipahami dan dijalankan berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing bahkan implementasinya tidak terkontrol.

Demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Di negara demokrasi, dilaksanakan langsung oleh rakyat atau wakil-wakilnya yang terpilih di bawah sistem hak pilih

yang bebas atau universal yang kita kenal sebagai PEMILU (Pemilihan Umum).

Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti yang terungkap dalam pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dari pernyataan ini bisa dinyatakan bahwa demokrasi dibangun di atas dua prinsip yaitu pemerintahan sendiri dan penetapan atau pembuatan undang-undang secara langsung oleh rakyat (Pierre Rosalvallon, 1995 :140)

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat diberi ruang untuk turut serta dalam pelaksanaan kebijakan untuk kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada pelaksanaannya tidak semua rakyat dapat terlibat dalam semua keputusan kebijakan pemerintah, tetapi melalui wakil-wakil rakyat yang telah mereka pilih dalam sistem pemilihan umum. Dikemukakan oleh Robert A. Dahl dalam bukunya yang berjudul *On Democracy*, “*democracy provides opportunities for effective participation; equality in voting; Gaining enlightened understanding; exercising final control over the agenda; and Inclusion of adults.*” Artinya bahwa demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk partisipasi yang efektif; persamaan dalam memberikan suara; mendapatkan pemahaman yang jernih; melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda; dan pencakupan warga dewasa.

Nilai-nilai demokrasi tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai demokrasi diantaranya yang berwujud kebebasan, persamaan, keadilan, disiplin, tanggung jawab, dan musyawarah. Nilai demokrasi berdasarkan Henry B. Mayo adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Adnan Buyung Nasution dalam jurnal Syafriadi (2017) berpendapat bahwa demokrasi bukan hanya tentang cara, alat atau proses, tetapi juga harus mampu menjiwai dan mencerminkan keseluruhan nilai-nilai demokrasi dalam proses kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Berangkat dari pengalaman praktik demokrasi di Athena, pertama setelah kekalahan dari sparta, yaitu dengan terjadinya kemerosotan kota, pembusukan moralitas dan kepemimpinan, plato melihat demokrasi didefinisikan sebagai ‘pemerintahan oleh mayoritas kaum

miskin’. Rakyat dapat melakukan apa pun yang diinginkannya dan tidak ada penghormatan terhadap otoritas (Sorensen, 2014: 3).

Nilai-nilai demokrasi pada hakikatnya sudah tercermin dalam era kejayaan kerajaan di Indonesia. Misalnya, pada Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada Kerajaan Sriwijaya, nilai-nilai demokrasi dapat terlihat pada terwujudnya hidup berdampingan antara agama Buddha dan Hindu, pada kerajaan sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Selanjutnya, nilai demokrasi dapat terlihat dari tumbuhnya nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif, hal ini dapat terlihat terjalannya hubungan antara Sriwijaya dengan India dan adanya pengiriman para pemuda untuk belajar ke India. Selain itu nilai-nilai demokrasi juga sudah tercermin dalam kehidupan kerajaan Majapahit. Antara lain agama Hindu dan agama Buddha hidup secara berdampingan secara damai, istilah Pancasila terdapat pada buku *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular, pada masa ini Raja Hayam Wuruk menjalin persahabatan baik dengan negara-negara tetangga, selanjutnya adanya penasehat dalam tata pemerintahan majapahit dan hal ini menunjukkan tentang nilai-nilai musyawarah dan mufakat sudah diterapkan pada masa kerajaan Majapahit.

Nilai-nilai demokrasi sudah ada sejak zaman Indonesia belum merdeka. Dalam pelaksanaan sampai masa sekarang bisa ditanamkan dan diajarkan sejak dini melalui menghargai satu sama lain. Menghargai perbedaan pendapat dan mendahulukan keputusan bersama (musyawarah) dibanding keputusan pribadi. Negara demokrasi akan berhasil apabila seluruh warga negara mampu mengimplementasikan mengenai nilai-nilai demokrasi. seluruh aspek kehidupan masyarakat harus mengimplementasikan mengenai nilai-nilai demokrasi.

Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi demi kebaikan bersama dalam lingkup bangsa dan negara. Oleh karena itu, diharapkan rakyat mampu memahami dengan baik mengenai proses pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya. Namun, pada faktanya dapat kita temui suatu hal yang dapat mencederai makna nilai demokrasi. Misalnya, *money politic* yang dapat kita temui dalam kontestasi politik di berbagai wilayah di Indonesia. Pada umumnya, calon legislatif baik DPRD kota/kabupaten/provinsi maupun DPR RI pusat memiliki cara kampanye yang sama yakni dengan politik uang. Para kandidat langsung membeli suara dari masyarakat dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang tunai dengan berbagai macam nominal untuk per orangnya.

Dalam situasi seperti ini, rakyat sebagai konstituen bisa memiliki harga tawar yang cukup tinggi. Fenomena tersebut sering terjadi dalam pertarungan para caleg untuk mendapatkan dan memiliki suara rakyat. Seiring berjalannya waktu, sistem demokrasi Indonesia mulai terlihat kekurangannya dengan pembungkaman sikap kritis pemuda dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, adanya istilah *money politik* pada kontestasi politik, serta beberapa hal lainnya, oleh karena itu sangat perlu adanya penegakan dari nilai demokrasi itu sendiri khususnya demokrasi pancasila.

Ada beberapa ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi, antara lain terjaminnya hak kebebasan, berpendapat, kebebasan pers, dan hak atas kesetaraan serta hak atas kepemilikan. Indonesia dikatakan sebagai negara demokrasi dimulai dari masa orde lama, terbukti pada masa itu Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dan beberapa tahun kemudian berganti menjadi demokrasi terpimpin. Indonesia menganut demokrasi pancasila pada masa orde baru, hal ini terbukti bahwa pada tahun 1998 Indonesia benar benar melaksanakan amanat dari demokrasi pancasila. Kebebasan pers mulai nampak dengan mulai bebas dalam ruang geraknya, kebebasan berpendapat mulai dijamin pada undang-undang pasal 28 UUD 1945.

Nilai demokrasi merupakan sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami, menyadari keanekaragaman di lingkungan, dan mampu menciptakan rasa kebersamaan, serta mampu mentaati peraturan-peraturan yang ada baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan tempat tinggal. Nilai demokrasi dapat diciptakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini tidak lepas pula dari implementasi nilai demokrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dengan julukan "*agent of change*" tentu tidak luput dari nilai sejarahnya. Dalam runtutan buku sejarah banyak topik yang mengulas tentang peran mahasiswa. Sebut saja dalam sejarah kelam masa reformasi 1998 serta banyak diketahui bahwa mahasiswa sangat aktif turut serta menyuarakan segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang dirasa merugikan rakyat kecil, mahasiswa tidak segan-segan untuk turun ke jalan untuk melaksanakan demonstrasi.

Pada tahun 1998, mahasiswa mampu mencatatkan sejarah besar sebagai agen perubahan bagi bangsa. Pada tahun 1998, mahasiswa menuntut perbaikan terhadap segala kondisi yang terjadi pada pemerintahan yang berkuasa waktu itu. Pada tahun tersebut juga terjadi pergolakan politik yang mampu membuat mahasiswa terpanggil untuk turun ke jalan, sehingga lahir gerakan mahasiswa tahun '98. Pada saat itu mahasiswa juga melakukan tuntutan dengan adanya reformasi sebagai unjuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan orde baru

sehingga mengakibatkan kemunduran presiden Soeharto yang berkuasa pada saat itu. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di lingkungan masyarakat. Ide dan pemikiran yang dimiliki mahasiswa diharapkan mengubah pandangan yang berkembang dalam suatu kelompok. Sikap kritis yang dimiliki mahasiswa juga diharapkan mampu membuat perubahan besar serta diharapkan mampu mengubah keburukan dari demokrasi yang dapat menghambat implementasi demokrasi di masyarakat.

Organisasi mahasiswa mampu menjadi wadah dalam implementasi nilai-nilai demokrasi, sebab di dalam pelaksanaan organisasi tentu tidak lepas dari adanya seorang pemimpin dan anggota. Seorang pemimpin tentu membutuhkan anggota agar suatu organisasi dapat berkembang dan berjalan. Sebaliknya, seorang anggota juga membutuhkan pemimpin untuk memimpin agar tidak ada dominasi anggota. Itulah mengapa implementasi organisasi dapat dilakukan meskipun dalam lingkup organisasi mahasiswa.

Dalam beberapa jurnal, Islam dan demokrasi memang menuai banyak pro dan kontra. Rowley dan Smith (2009) dalam jurnal Niklas Potrafke (2010) menemukan bahwa negara-negara dengan mayoritas muslim menikmati lebih sedikit kebebasan dan kurang demokratis dibandingkan negara-negara di mana Muslim adalah minoritas. Karena indeks POLITY IV dan Freedom House telah dikritik atas beberapa alasan, Niklas Potrafke kemudian menyelidiki kembali temuan Rowley dan Smith menggunakan data Demokrasi-Kediktatoran baru dari Cheibub et al. (2010). Hasil empiris menegaskan bahwa negara-negara dengan mayoritas Muslim memang cenderung tidak demokratis.

Islam dan demokrasi bukan hal yang berbeda. Ada banyak ulama' yang memberikan pendapatnya mengenai Islam dan demokrasi. menurut Abdurahman Wahid nilai demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada pula yang bersifat *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok. Ada tiga hal nilai pokok dalam demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Kedua, keadilan merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga ekonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nilai demokrasi yang ketiga adalah *syura* (musyawarah), artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan lewat jalur permusyawaratan.

Jika dilihat dari basis empiriknya, Islam dan demokrasi, menurut Mahasin (1993:30) dalam jurnal Muhammad Abduh (2014) adalah dua sisi yang berlainan karena menurutnya Islam berasal dari wahyu Allah sedangkan demokrasi adalah berasal dari pemikiran

manusia. Dengan demikian, Islam dan demokrasi memiliki dialektikanya sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Islam dan demokrasi berjalan berdampingan. Sedangkan menurut pandangan John L. Esposito dan John O. Voll berpendapat bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia saat ini sangat kompleks. Dunia Muslim tidak secara ideologis monolitik. Ini menyajikan berbagai perspektif, mulai dari ekstrem mereka yang menolak tentang hubungan antara Islam dan demokrasi sampai mereka yang berpendapat bahwa Islam membutuhkan sistem demokrasi. Di beberapa negara dimana Muslim sebagai mayoritas banyak Muslim yang percaya bahwa Islam sebagai pendukung demokrasi, meskipun sistem politik khusus mereka tidak secara eksplisit mendefinisikan dirinya sebagai Islam.

Analisis Nurcholis mengenai seluk-beluk demokrasi banyak berlandaskan teks Alquran tentang kebebasan dan tanggung jawab individual (QS. 6:94), tentang kebebasan eksperimen (QS. 18:29), tentang sikap kebijaksanaan (QS. 16:125), tentang keadilan (QS. 5:58, 4 :135), dan tentang musyawarah (QS. 3:159, 42:38). Nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Al-Qur'an ini diharapkan masyarakat mampu menerapkannya. Bagi Nurcholis terdapat banyak kesamaan antara nilai-nilai demokrasi dan nilai dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an, yakni untuk kebaikan bersama, sehingga dengan sangat mudah umat Islam menerima demokrasi.

Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu dari Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur, didalamnya terdiri dari beberapa organisasi, baik itu organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra kampus. Organisasi intra kampus terdiri dari beberapa macam, antara lain adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Prodi (HMJ/P), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Dalam organisasi lingkup UKM juga masih terdiri dari macam-macam UKM, diantaranya UKKI, UKKH, UKKK, UK3P, Tari, segala jenis cabang olahraga, Catur, Pramuka, dan lain lain. Namun, dalam penelitian ini peneliti tertarik melakukan studi kasus pada UKM UKKI. Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Negeri Surabaya (UKKI UNESA) adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK). UKKI didirikan pada tanggal 22 Januari 1988 dengan SK Rektor No.00044a/pt33/Kep/U/1988 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Masjid Baitul Makmur I UNESA, yang terbagi menjadi dua wilayah kampus yakni wilayah Kampus Ketintang dan Kampus Lidah Wetan. UKKI dicetuskan pada tahun 1988 dan saat ini sudah berumur 33 tahun. Hingga saat ini organisasi UKKI UNESA masih aktif menjadi wadah lembaga

dakwah kampus dan aktif dalam menjalankan setiap program kerja yang telah di rencanakan.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif (Strauss, A., & Corbin, J: 2003) Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif studi kasus. Studi Kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, maupun organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. (Mudjia Rahardjo : 2017).

Dilihat dari kasus yang diteliti, menurut Endraswara (2012: 78) dalam (Mudjia Rahardjo: 2017). Studi Kasus dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu, (1) Studi kasus berupa penyimpangan dari kewajaran dan; (2) Studi Kasus ke arah perkembangan yang positif. Studi Kasus pertama bersifat kuratif dan disebut Studi Kasus Retrospektif (*Retrospective Case Study*), yang memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus (*treatment*). Tindak penyembuhan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten. Peneliti hanya memberikan masukan dari hasil penelitian.

Dalam penelitian ini mengarah ke studi kasus dikarenakan dalam organisasi UKM UKKI UNESA yang dikenal sebagai organisasi besar di UNESA. Tentu dalam proses pelaksanaannya dikenal memiliki banyak program kerja yang dimana dalam proses tercapainya juga membutuhkan rapat dan musyawarah yang dinilai sebagai wujud dari nilai nilai demokrasi. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian ini merupakan satu tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif karena lokasi penelitian akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian yakni di sekretariat UKM UKKI UNESA.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek secara cermat yaitu ketua organisasi UKM UKKI UNESA, Fungsiaris UKKI UNESA, dan anggota UKM UKKI UNESA. Peneliti mengambil subjek ketua organisasi UKKI UNESA dikarenakan dalam

menjalankan roda organisasi tentunya seorang ketua atau pemimpin organisasi ini turut banyak terlibat sehingga dirasa seorang pemimpin pasti mengetahui seluk beluk, pahit manis dalam menjalankan organisasi, seorang pemimpin pastinya juga merasakan dan memiliki evaluasi tersendiri dalam menjalankan roda organisasi. Dalam demokrasi, rakyat memiliki andil yang besar dan dalam konteks organisasi ini yang dikatakan rakyat adalah Anggota UKM UKKI UNESA. Fungsi Informan dalam Penelitian kualitatif adalah sebagai pengumpulan data penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah implementasi nilai-nilai demokrasi pada pelaksanaan organisasi UKM UKKI UNESA.

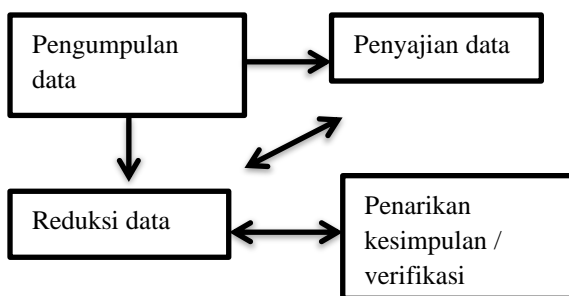
Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara yang terdiri dari 3 informan, yakni Ketua Umum, Fungsionaris dan Anggota, serta didapat dari observasi.

Adapun informan penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Data Informan

Nama	Usia	Jabatan
Imron Zainuddin L	21	Ketua umum
Uci Vebia P	21	Fungsionaris (Bendahara Umum)
Deddy yusuf	21	Anggota

Sebelum data dianalisis terlebih dahulu diolah secara ringkas dan sistematis (menulis hasil pengamatan, wawancara, rekaman, dokumentasi, selanjutnya mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan). Kegiatan ini berlangsung terus menerus semenjak peneliti mulai memasuki lapangan sehingga analisis data berlangsung selama pengumpulan data. Pada garis besarnya, tahapan analisis data ditempuh langkah-langkah: (1) Reduksi data, yaitu membuat abstraksi atau rangkuman, (2) Penyajian data, yaitu penyajian dengan mengambil pokok-pokok namun dapat dijamin kesahihannya, dan (3) Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menarik kesimpulan tentatif sehingga memungkinkan verifikasi selama penelitian berlangsung (Saleh, S: 2017).



Bagan 1. Analisis data miles huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit kegiatan Kerohanian Islam Universitas Negeri Surabaya

Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Negeri Surabaya atau disingkat dengan UKKI UNESA yang berfungsi sebagai: Organisasi Dakwah, Organisasi Kader, dan Organisasi Kemahasiswaan. UKKI UNESA didirikan pada tanggal 22 Januari 1988 dengan SK Rektor No. 0004a/pt33H/Kep/U/1988 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Masjid Baitul Makmur I UNESA yang terbagi menjadi dua wilayah kampus yakni wilayah Kampus Ketintang dan Kampus Lidah Wetan.

Struktur organisasi UKKI UNESA memiliki deskripsi kerja masing-masing sesuai dengan teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*). Secara garis besar ketua umum berfungsi sebagai penanggung jawab organisasi. Sekretaris bertanggung jawab dalam administrasi, manajerial dan dokumentasi. Bendahara bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan organisasi. Humas bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan organisasi serta instansi baik di dalam maupun di luar UNESA. Koordinator wilayah bertanggung jawab dalam permasalahan internal masing-masing wilayah. Ketua dan wakil departemen bertanggung jawab dalam permasalahan internal masing-masing departemen. Ketua dan wakil bidang bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan program kerja. dari semuanya tentu bertanggung jawab dalam melaporkan hasil kerja masing-masing ke tingkatan yang lebih tinggi.

Anggota UKKI UNESA adalah mahasiswa muslim yang menempuh jenjang D3, D4, dan S1 di Universitas Negeri Surabaya dan telah mendaftarkan diri sebagai anggota dan diteria sebagai anggota. Rekrutmen anggota baru dalam organisasi UKKI UNESA seperti yang dijelaskan oleh Ketua Umum UKKI UNESA, berikut hasil wawancara kepada ketua umum UKKI saudara Imron Zainudin L:

“Kalau kita biasanya dari awal *recruitment* seperti UKM yang lainnya, ketika ada mahasiswa baru yang masuk itu ada pendataannya ada misalnya gabung di UKKI ada pendataannya, proses *recruitment* sendiri ada beberapa tahapan, yang pertama *oprec*, silaturahmi calon anggota baru, SII, ketika SII sudah selesai dinyatakan lulus baru dia akan masuk ke bidang, kegiatan sosialisasinya bidang itu ada di sebelum SII tadi, jadi teman-teman sudah memilih apa saja bidang yang di mau dan sudah cocok dengannya baru ketika SII sudah selesai baru diumumkan masuk di bidang apa misal di bidang TQQ, bidang Kais atau bidang Pengmas dan lainnya”. (Wawancara, 30 Maret 2022)

Tabel 2. Persebaran dan Jumlah anggota UKKI UNESA

Bidang	Angkatan 19	Angkatan 20	Angkatan 21
Anggota Bidang Wilayah Ketintang			
TQQ	-	4	11
Kajian Ilmiah	-	6	11
Anak	-	9	7
PSDI	1	6	11
Kaderisasi	2	4	9
KAIS	-	7	10
KWU	4	7	4
Infokom	-	9	9
Pengmas	-	4	10
Senbud	-	7	14
Binjar	-	7	11
PSDA	-	7	8
Anggota Bidang Wilayah Lidah Wetan			
TQQ	3	7	7
TQS	6	3	7
PSDM	1	9	6
Kaderisasi	3	8	7
KWU	4	6	10
KAIS	7	5	9
Infokom	3	11	5
Binjar	10	6	8
PSDA	2	7	7

Seperti organisasi pada umumnya, tentunya dalam organisasi UKKI UNESA juga terdapat sebuah anggota, dalam proses rekrutmen anggota baru dimulai dari tahun ajaran baru dimana mahasiswa baru terdapat pembekalan lingkungan kampus, dalam rangkaian acara tersebut terdapat sebuah agenda acara yang bernama Expo UKM, pada saat Expo UKM tersebut apabila mahasiswa baru yang tertarik dengan UKM UKKI UNESA maka akan ada pendataan. Proses rekrutmen kemudian dilanjutkan dengan wawancara kemudian agenda silaturahmi calon anggota baru yang disingkat dengan SITARUKISA, dilanjutkan dengan SII (Study Islam Intensif), dalam agenda SII tersebut anggota baru di plot kan ke dalam bidang bidang yang terdapat dalam UKKI UNESA.

Dalam proses penentuan ketua umum dapat dijelaskan oleh ketua umum terpilih 2022:

“Kalau dari ketua umum, ketua umum itu dipilih saat muktamar, pelaksanaan muktamar itu biasanya di akhir periode, pelaksanaannya di bulan Desember, itu biasanya melaksanakan ada beberapa angkatan dan pengurus inti sebelumnya, angkatan 18 2 orang ada perwakilan dari 2 wilayah tadi Ketintang dan Lidah Wetan ada 3 orang dari Angkatan 2019 selaku nanti calon pemegang ketua umum dan pengurusnya nanti, yang ke 2, 2 orang perwakilan dari Angkatan 2020 lidah wetan maupun Ketintang dan 1 orang dari anggota UKKI angkatan 2021 jadi disitu mereka diskusi rembug,

musyawarah siapa kandidat yang pantas dan cocok memimpin UKKI kedepannya seperti itu, jadi ada beberapa pertimbangan yang mereka pikirkan yang mewakili beberapa orang yang di angkatannya mereka dan memutuskan ketua umum UKKI siapa. Terus untuk fungsionarisnya, fungsionaris melibatkan pengurus inti melibatkan ketua umum yang terpilih dari formatur tadi dan melibatkan orang orang tadi tim formatur tadi untuk berdiskusi dengan ketua umum siapa yang cocok jadi fungsionaris pengurus inti seperti bendahara umum, sekretaris umum dan humas umum jadi itu melibatkan tim formatur dan ketua umum”. (Wawancara, 30 Maret 2022).

Dalam pemilihan ketua Umum UKKI UNESA ini tidak melibatkan seluruh anggota, namun menerapkan sistem perwakilan dan setiap anggota yang mewakili akan disebut sebagai tim formatur, tim formatur adalah tim yang berfungsi untuk memilih ketua umum, anggota balitbangtim dan membantu ketua umum terpilih dalam menyusun kepengurusan. Tim formatur ini dipilih dalam forum angkatan dan akan mewakili masing-masing angkatan. Sebelum agenda muktamar dilaksanakan, masing-masing angkatan melakukan rapat untuk menentukan perwakilan anggota dalam pelaksanaan muktamar. Dalam agenda muktamar yang dilaksanakan di akhir periode, seluruh tim formatur akan rapat atau diskusi untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum selanjutnya. Jadi, ketua umum tidak dipilih langsung oleh seluruh anggota namun dipilih melalui tim formatur yang sebelumnya sudah melakukan diskusi sendiri oleh masing-masing angkatannya.

Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Pancasila

Implementasi merupakan pelaksanaan dan penerapan. Implementasi nilai-nilai demokrasi pancasila dalam organisasi khususnya organisasi kemahasiswaan sangat berhubungan erat ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Roda organisasi akan berjalan dengan baik senada dengan demokrasi pancasila yang telah diterapkan. Dalam kehidupan modern saat ini saat budaya dan pemahaman baru akan masuk silih berganti namun budaya dan pemahaman baru ini akan menjadi peluang maupun tantangan. Mahasiswa sebagai generasi muda sepatutnya mampu memilah mana yang perlu diterapkan dan mana yang tidak perlu diterapkan.

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu yang bernilai berarti sesuatu itu berharga bagi kehidupan manusia. Nilai merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.

Berikut isi Wawancara dengan ketua umum UKKI UNESA Imron Zainudin L terkait dengan definisi dari demokrasi

“...Oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat, semua itu kembali di rakyat. Jadi semua itu yang mengatur rakyat seperti itu. Jadi kembali untuk rakyat itu dari saya....” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Senada dengan ketua Umum, berikut definisi demokrasi menurut fungsionaris UKKI UNESA Uci Vebia P :

“...Kurang lebih sama tapi sedikit tambahan bahwa Demokrasi itu mengajarkan kita tentang keadilan jadi tiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut atau dalam negara tersebut memiliki hak yang sama untuk menentukan suatu keputusan seperti itu...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Sedangkan menurut anggota UKKI UNESA Dedy Yusuf definisi demokrasi yakni:

“...Demokrasi kalau menurut saya adalah suatu pendapat di organisasi yang semua elemennya itu bisa mengutarakan pendapat, jadi tidak hanya atasnya saja dan untuk kepemimpinan nya itu juga bisa dari semuanya tidak tergantung dari kasta seperti kerajaan....” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dari beberapa pemaparan di atas dapat di definisikan bahwa demokrasi adalah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, artinya dalam demokrasi kita diajarkan tentang keadilan dan semua orang memiliki hak yang sama dan menentukan suatu keputusan dan mengutarakan pendapat.

Nilai demokrasi merupakan nilai-nilai dimana didalamnya terdapat nilai saling toleransi, menghargai perbedaan pendapat yang ada di lingkungan kampus dan organisasi, menghargai hak orang lain serta melaksanakan kewajiban diri sendiri sebagai warga negara serta mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan. Sedangkan pendapat Syaiful arif Menyatakan bahwa nilai demokrasi adalah sebuah paradigma yang bukan hanya berkaitan dengan kepentingan individu namun juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Syaiful Arif: 2012).

Nilai-nilai demokrasi menurut Cipto dalam jurnal (Aulawi A & Srinawati: 2019), meliputi : 1) Kebebasan Menyatakan pendapat; 2) kebebasan berkelompok; 3) kebebasan berpartisipasi; 4) kesetaraan antar warga; 5) Rasa Percaya (*trust*); dan 6) kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2022 di sekretariat Unit Kegiatan Kerohanian Islam UNESA, berikut adalah perspektif dari ketua umum dan fungsionaris terkait dengan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di organisasi Unit Kegiatan Kerohanian Islam.

Berikut isi Wawancara saya dengan ketua Umum UKKI UNESA Imron Zainudin L terkait dengan kegiatan di UKKI:

“...Kalau dari saya pribadi UKKI sudah menerapkan budaya demokrasi. Contohnya pengambilan keputusan di mana pengambilan keputusan tersebut kita langsung ambil dari anggota kita, diskusi bersama sama kita ambil jalan tengah bersama sama. Kita ambil mufakatnya seperti kemarin musyawarah kerja dan muktamar pemilihan ketua umum juga termasuk dari Demokrasi juga disana ada pemilihan dan juga kesepakatan disana....” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam organisasi UKKI sudah menerapkan nilai-nilai dan budaya dari demokrasi itu sendiri, misalnya dalam pengambilan keputusan, di dalam UKKI pengambilan keputusan dilaksanakan dengan diskusi bersama anggota kemudian dari diskusi tersebut diambil jalan tengahnya dan dicari kata mufakat. Pengambilan keputusan misalnya musyawarah kerja dan Muktamar.

Pendapat lain juga disampaikan oleh fungsionaris UKKI UNESA Uci Vebia P

“...Menurut saya di UKKI sendiri terkait dengan Demokrasi itu sudah terlaksana dengan cukup maksimal ya, meskipun nantinya dalam pelaksanaannya kita merger dengan sistem musyawarah jadi kalau misalkan sebagai contoh di dalam pengambilan keputusan untuk ketua umum kemarin saat muktamar itu setiap angkatan diminta menentukan suara mereka lebih condong ke yang mana, setelah itu dibawa suata tiap angkatan ini ke dalam sidang formatur, dalam sidang formatur ini bersistem musyawarah seperti itu...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwasannya terkait dengan budaya organisasi lebih mengarah pada musyawarah, tetapi sisi lain kegiatan organisasi ini juga berdasarkan delegasi anggota. Dalam organisasi memiliki tujuan dan visi misi sendiri dari setiap anggotanya, organisasi juga mengajarkan setiap anggotanya untuk menurunkan ego masing-masing dan melatih jiwa kepemimpinan. Dalam nilai-nilai demokrasi organisasi harus selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan untuk mensinkronkan cita-cita bersama dan juga untuk mempertahankan eksistensi organisasi UKKI UNESA. Dalam proses pengambilan keputusan yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam keberlanjutan organisasi, organisasi UKKI UNESA dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat untuk mengatasi segala persoalan yang ada di organisasi UKKI.

Berikut adalah hasil wawancara dengan ketua umum UKKI UNESA Imron Zainudin L terkait pengambilan keputusan yang ada di UKKI UNESA:

“...Kalau di program kerja, program kerja kita sebelum melakukan program kerja ada

musyawarah kerja, musyawarah kerja itu kan apalagi UKKI ada 2 wilayah ada beberapa bidang, itu diusulkan disana, kita diskusi disana mungkin ada yang memberikan saran atau mencela dan sebagainya. Jadi kita diskusi disana, jadi semua itu melibatkan semua orang yang ada disana melibatkan beberapa bidang dan beberapa angkatan disana yang sekiranya program kerja yang bisa dilaksanakan yang cocok untuk kegiatan kedepan bisa kita laksanakan seperti itu...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam UKKI UNESA terbagi atas 2 wilayah, Ketintang dan Lidah Wetan dan beberapa bidang. Di dalam program kerja yang bernama Musyawarah Kerja terdapat contoh dari Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Pancasila karena didalamnya terdapat diskusi dan memberikan kritik maupun saran yang tepat guna pelaksanaan program kerja yang cocok dan akan dilaksanakan oleh organisasi UKKI UNESA Kedepannya.

Di lain pandangan, sebagai anggota tentunya memiliki peran yang penting dalam penentuan suara, dalam Demokrasi disebutkan bahwa rakyat lah pemegang suara demokrasi, jika dalam organisasi rakyat dianalogikan sebagai anggota. Berikut hasil Wawancara saya dengan anggota UKKI UNESA Dedy Yusuf .

“...Kalau dilibatkan langsung pernah, karena saya juga pernah mengikuti di rapat, rapatnya itu seperti contohnya rapat musyawarah kerja itu juga kan kita ditanyai juga tentang pendapat nya apakah ada yang perlu di tambah atau ada koreksi seperti itu, jadi kita bisa langsung mengutarakan pendapat kita di rapat tersebut...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa informan selaku Anggota UKKI UNESA pernah dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan yang ada di organisasi, informan memberikan contoh pernah terlibat dalam program kerja Musyawarah Kerja dimana didalamnya anggota di berikan kesempatan untuk memberikan kritik saran maupun pendapatnya.

Dalam perspektif anggota dan fungsionaris terkait dengan urgensi nilai demokrasi jika diterapkan dalam suatu organisasi khususnya di organisasi UKKI UNESA memiliki beberapa pendapat, dari ketua umum UKKI UNESA Imron Zainudin L menyatakan bahwa :

“...Kalau dari saya pribadi sangat penting, soalnya kita tidak bisa otoriter. Di mana semua itu melibatkan orang banyak apalagi UKKI sendiri itu ada banyak macam macam, agama nya cuma 1 Islam tapi cabang cabangnya banyak sehingga kita harus memberikan Demokrasi dalam pemecahan masalah semisal kita ada masalah tertentu ada yang harus kita selesaikan kita ambil jalan tengah yang ada di Demokrasi tersebut...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pandangan ketua umum bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi di dalam suatu organisasi sangat penting dikarenakan pemimpin tidak bisa bersikap otoriter, di dalam UKKI UNESA untuk agama nya memang hanya Islam, namun di dalamnya terdapat banyak sekali ormas yang berbeda dan masuk di UKKI UNESA, sehingga demokrasi dapat diterapkan ketika terjadi suatu permasalahan dapat diambil jalan tengahnya.

Hal senada pun disampaikan oleh fungsionaris Uci Vebia P

“...Kalau menurut saya peran demokrasi di UKKI sendiri cukup penting namun ada beberapa faktor yang mungkin kita harus bersikap tegas, sikap tegas ini memang kita landasi perbedaan perbedaan pendapat yang kemudian di wadah nah kan kita tidak mungkin mengabulkan perbedaan ini semuanya secara keseluruhan, akhirnya sebagai seorang fungsionaris kita harus menetapkan keputusan mana yang mungkin memiliki resiko paling kecil...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa menurut pandangan fungsionaris peran demokrasi dalam UKKI UNESA sangatlah penting, sebagai fungsionaris harus memiliki ketegasan terhadap perbedaan pendapat yang ada di anggota UKKI, sebab dengan jumlah anggota yang banyak tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat dan fungsionaris tentu tidak bisa mengabulkan pendapat satu persatu, maka fungsionaris berperan dalam menetapkan keputusan mana yang mungkin memiliki resiko yang paling kecil.

Pendapat lain pun disampaikan oleh anggota UKKI UNESA Dedy Yusuf :

“...Kalau urgensinya kan karena memang di daerah kita Indonesia kan memang umumnya Demokrasi jadi mungkin itu bisa dibidang menyesuaikan karena memang suara dari teman teman kalau tidak didengar kan pastinya ada sedikit kekecewaan karena memang di daerah kita Demokrasi, mungkin beda cerita kalau di daerah kita menganut seperti kerajaan yang bukan fungsionaris jadi bisa rela atau Terima. Seperti di Inggris. (Iyo iyo ae opo jare sing dhuwur) tapi karena kita Demokrasi adatnya begitu jadi diikuti saja...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pandangan Anggota UKKI demokrasi sangatlah penting dikarenakan kita hidup di negara yang menganut sistem demokrasi sehingga suara dari anggota lain pun akan dipertimbangkan.

Implementasi Nilai-nilai demokrasi dapat ditunjukkan dalam perencanaan program kerja, dalam perencanaan program kerja tersebut tentu membutuhkan suatu pendapat dari anggota maupun dari pengurus lainnya.

Berdasarkan wawancara pada Ketua Umum UKKI UNESA Imron Zainudin L :

“...Untuk perencanaan sebuah program kerja kami, didahului dengan penyepakatan dalam musyawarah kerja, sesudah program yang di usulkan disetujui dalam musyawarah tersebut ,maka program tersebut dapat di jalankan oleh pihak pengusul, sebelum terlaksana program kerja kami biasanya di dahului dengan pembuatan proposal program kerja yang di dalamnya sudah tersusun secara gamblang mengenai konsep program kerja, sesudah pembuatan proposal, ketua pelaksana atau ketua acara mengadakan beberapa diskusi dan rapat untuk merealisasikan acaranya guna meminimalisir miskomunikasi dan miskonsepsi antar panitia yang terbentuk, dalam program kerja kami lama tidak persiapannya tergantung progam yang di usulkan. Jika di rasa program kerja yang akan dilaksanakan cukup Akbar maka persiapannya harus lama dan terstruktur. Ketika rapat rapat dari awal hingga sudah terlaksana maka program kerja siap dilaksanakan. Setelah acara, diadakan evaluasi guna mengetahui apa saja yang terjadi di program kerja yang sudah terlaksana dan ini merupakan tambahan yang sangat penting guna memperbaiki program kerja di kemudian hari. Jika program kerja akan dilaksanakan di tahun selanjutnya, kemudian di akhiri dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan program kerja UKKI UNESA didahului dengan Musyawarah Kerja yang didalamnya terdapat diskusi antar fungsionaris dan anggota kemudian menghasilkan kesepakatan. Jika program kerja sudah terdapat program kerja yang sudah disepakati oleh semua pihak maka langkah selanjutnya adalah pembuatan proposal, implementasi nilai-nilai demokrasi ditunjukkan dalam diskusi-diskusi untuk mempersiapkan program kerja, dalam diskusi tersebut dilaksanakan guna meminimalisir adanya miskomunikasi dan miskonsepsi antar panitia. Dalam persiapan program kerja tersebut dapat diidentifikasi terlebih dahulu tingkat insidental maupun rutinan. Jika program kerja tersebut bersifat insidental maka persiapannya harus lama dan terstruktur. Misalnya saja pada program BKM (Bakti Karya Mahasiwa), program kerja tersebut bersifat insidental sehingga persiapan harus matang dan terstruktur. Dalam kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alur pelaksanaan program kerja insidental salah satunya adalah BKM (Bakti Karya Mahasiswa) dimulai dari kesepakatan awal pada Musyawarah Kerja terkait dengan penanggung jawab dan tanggal pelaksanaan, langkah selanjutnya adalah pemilihan ketua pelaksana dan panitia serta pembuatan proposal. selanjutnya untuk pembahasan sub program

kerja dalam BKM akan di adakan sesi diskusi, di dalam diskusi tentu akan ada perbedaan pendapat maka ketua pelaksana maupun penanggung jawab harus memilah mana yang akan di sepakati.

Kebebasan Menyatakan Pendapat

Demokrasi dan kebebasan berpendapat adalah dua hal yang tidak mungkin ada terlepas dari satu sama lain, negara dapat disebut negara dengan demokrasi ketika penduduk bebas berekspresi baik pendapat lisan maupun tulisan. Untuk kebebasan berpendapat adalah hak yang harus dilindungi oleh negara. Negara Indonesia dalam sistem pemerintahan yang menganutnya Demokrasi telah mengatur kebebasan berpikir dan berpendapat Pasal 28 Ayat E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat. Berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dimiliki setiap warga negara yang dijamin serta dilindungi oleh negara, dalam implementasi kebebasan berpendapat bisa dituangkan berupa tulisan, diskusi atau debat serta dalam kegiatan pers, setiap warga negara secara sah dapat mengutarakan bagaimana pendapatnya. Kebebasan berekspresi (dan beropini) merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya di depan umum merupakan lambang demokrasi dalam bermasyarakat, bernegara, dan dalam tata cara hidup di negara ini. hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak yang mendasar, dan itu adalah karunia dari Tuhan. Hak asasi manusia pada dasarnya mencakup dua hak yang paling mendasar, yaitu hak atas persamaan dan hak atas kebebasan. Hak asasi manusia lainnya lahir dari kedua hak dasar tersebut, hak asasi manusia lainnya sulit untuk dipertahankan (Ningsih, C. et al.: 2021).

Dalam organisasi UKKI UNESA, telah mengamanatkan nilai-nilai demokrasi pancasila kebebasan berpendapat. Dari hasil wawancara pada tanggal 30 Maret 2022, dengan hasil wawancara berikut: Ketua umum UKKI UNESA menyatakan bahwa:

“..Iya, di dalam organisasi seperti UKKI kami membebaskan setiap individu dapat memberikan pendapat karena kami percaya setiap pendapat memiliki daya untuk memberikan daya dorong agar UKKI semakin bertambah besar kemudian hari...”. (Wawancara, 30 Maret 2022)

Senada dengan ketua Umum, fungsionaris UKKI UNESA Uci Vebia P juga menjawab berikut:

“...Sesuai pengamatan saya sejauh ini, semua anggota di UKKI diberikan kesempatan yang sama untuk Menyatakan berpendapatnya...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan data wawancara kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi UKKI UNESA memberikan kebebasan dalam setiap anggota menyatakan pendapatnya, karena dengan memberikan kebebasan berpendapat, maka akan lebih banyak lagi inovasi yang diberikan anggota guna kebaikan organisasi UKKI UNESA.

Dari sudut pandang yang berbeda, dari anggota UKKI juga mengiyakan adanya kebebasan pendapat di organisasi ini.

Dalam salah satu program kerja UKKI UNESA, kebebasan berpendapat terlihat dari observasi yang dilaksanakan oleh peneliti, berikut adalah dialog dari implementasi kebebasan berpendapat di UKKI UNESA:

“Presidium: Dari musyawirin apakah ada yang berpendapat ?

Musyawirin: Sedikit penguatan pak presidium, mengapa festival banjari ini perlu dilakukan, karena ini salah satu langkah yang nantinya akan mengenalkan UKKI secara umum, nantinya kan ada tuntutan dari WR dari UKM harus memberikan sebuah prestasi yang digunakan untuk simpelmawa, kalau saranku festival banjari ini kan ada anggaran 2 juta itu cukup besar, nanti kan ada *paid promote* atau nanti bisa mencari *sponsorship* yang lainnya juga kan banyak cara untuk memberikan dana terutama SCR ini bisa berjalan maksimal dengan adanya festival banjari.

Presidium: Baik, dari musyawirin apakah ada yang memberikan pendapat?

Presidium: Baik, jadi ada opsi lain terkait festival banjari tetap dilaksanakan, jadi tidak mengubah dari bentuk kegiatan yaitu kegiatan SCR tetap serangkaian acara yang dikemas dalam satu kegiatan untuk memperingati hari besar Islam dalam bentuk bedah buku dan festival banjari.”

Dalam kegiatan Musyawarah Kerja yang membahas tentang program kerja dari UKKI UNESA untuk satu periode kedepannya tetap menguatamakan nilai-nilai dari demokrasi, hal ini terbukti dengan adanya salah satu program kerja yang mulanya masih rancu untuk dilaksanakan atau tidak. Pada awalnya kegiatan festival banjari tidak dilaksanakan karena terkendala dengan anggaran, namun dari hasil diskusi dan sumbangan suara dari musyawirin akhirnya kegiatan festival banjari tetap dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat dari Anggota UKKI UNESA Dedy Yusuf, beliau mengatakan bahwa :

“...Kalau perbedaan pendapat tentunya pasti ada dan Alhamdulillah nya selama ini bisa ditemukan titik tengahnya atau salah satunya bisa mengalah atau mengerti kenapa anggota ini ada pendapat seperti ini dan mereka ada kesepakatan untuk mengambil keputusan yang mana...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Di lain konteks, kebebasan Menyatakan pendapat dalam hal mengkritik kinerja pun diberikan kebebasan, namun kebebasan disini bukan sebebas-bebasnya mengkritik namun terdapat *step* dan etika dalam memberi kritik. Hal ini disampaikan kembali oleh anggota UKKI UNESA

“...Seperti memberi saran atau kritik ada dan setau saya dulu kalau tidak salah ada *step-stepnya* tidak langsung ke KETUM, emang bisa ke KETUM cuman kalau anggota biar lebih enak disampaikan ke ketua bidang nanti bidang ke departemen dan departemen nanti ke korwil baru ke ketum biar enak terstruktur dalam penyampaianya...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Berdasarkan data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat di UKKI UNESA pasti ada, dan setiap anggota yang memberikan pendapat tentu memiliki alasan tersendiri sehingga perlu dicari titik tengahnya. Kemudian, untuk kebebasan dalam mengkritik kinerja fungsionaris tentu terdapat alur tersendiri sehingga penyampaian lebih terstruktur.

Kebebasan Berkelompok

Berkelompok merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dipungkiri. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara diberikan kebebasan dalam berkelompok dan membentuk kelompok, misalnya membentuk partai politik, lembaga swadaya, organisasi masyarakat dan sebagainya. Namun dalam kebebasan berkelompok harus dalam kaidah negara demokrasi, tidak boleh melakukan penyelewengan.

Dari pandangan Ketua Umum UKKI UNESA saudara Imron Zainudin L menyatakan bahwa :

“...Iya, kami bebaskan namun tetap dalam koridor koridor yang masih menjaga toleransi antar faham faham yang berbeda harapan kami beda ini bukan penghalang untuk problem namun beda ini adalah daya dorong untuk menjadikan UKKI lebih berwarna dan menjadi miniatur sebuah kehidupan di masyarakat yang nantinya anggota terjun ke sana...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Di lain pandangan, menurut pendapat Fungsionaris Uci Vebia P menyatakan bahwa :

“...Iya, tergantung bagaimana kelompok itu terbentuk. Yang diharapkan tidak menjadi propoganda dalam organisasi...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dedy Yusuf selaku Anggota UKKI UNESA juga menyampaikan pendapatnya :

“...Kadang iya kadang tidak, kalau memang kelompok itu baik ya boleh-boleh saja biasanya...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dari kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasannya organisasi membebaskan setiap anggota untuk berkelompok, namun masih dalam koridor

demokrasi dan tidak menjadi propaganda dalam organisasi. Dalam organisasi UKKI UNESA, memiliki faham yang berbeda menjadikan kekuatan bagi organisasi karena dalam masyarakat nantinya akan banyak ditemukan perbedaan.

Dalam organisasi, kebebasan berkelompok adalah hak setiap anggota yang bersangkutan, namun dalam organisasi dimana notabene agama yang dianut adalah agama Islam semua sehingga kelompok yang diikuti oleh anggota kemungkinan sama, namun tidak menutup kemungkinan apabila terdapat kelompok Islam fanatik yang memiliki faham anti negara atau anti Pancasila yang bersinggungan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Dalam hal kebebasan berkelompok, organisasi sangat terbuka dan sangat mendukung guna meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap anggota.

Dalam mengembangkan sikap kebebasan berkelompok dengan menyediakan forum seperti organisasi dapat memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan haknya dalam berorganisasi, tetapi kebebasan ini dalam artian tidak bebas-sebebasnya dan tidak mengganggu hak orang lain. Dalam organisasi, aturan ditetapkan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Aturan tersebut kemudian dibuat berdasarkan persetujuan para anggota dalam suatu organisasi. Aturan yang ditetapkan harus tegas serta jelas.

Kebebasan Berpartisipasi

Kebebasan berpartisipasi adalah salah satu wujud dari sebuah negara demokrasi, kebebasan demokrasi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang mana negaranya menganut sistem demokrasi. Kebebasan berpartisipasi merupakan perwujudan dari kebebasan berpendapat dan kebebasan berkelompok/berserikat.

Berdasarkan pendapat dari Anggota UKKI UNESA "...Karena sudah dibagi job desc jadi bisa mengikuti sesuai *job desc*, kemudian kalau ada teman teman yang lain yang membutuhkan bantuan meskipun bukan *job desc*nya ya bisa dibantu kalau memang mampu..."(Wawancara, 30 Maret 2022)

Di lain pihak, Ketua Umum UKKI UNESA memberikan pendapatnya sebagai berikut :

"...Kalau dari aku pribadi mungkin ini 'kan kondisinya belum stabil masih *online* dan *offline* jadi kalau partisipasi teman-teman juga cukup andil maupun dari kegiatan *online* tetep andil, maupun dari kegiatan kecil, besar maupun sudah besar. Seperti kemarin BKM, beberapa angkatan sudah ada disana terdapat 2021, 2020, dan panitianya angkatan 2019 dan tidak melupakan juga angkatan 2018 juga ikut di sana, jadi semua dari kepengurusan dari angkatan 2019, dan lainnya

itu berjalan dengan baik dan dengan keseluruhan..." (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dari kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggota dan fungsionaris UKKI UNESA sangat berpartisipasi aktif baik dalam melakukan *jobdesc* maupun dalam membantu *jobdesc* anggota lain, hal ini terbukti dalam kegiatan online maupun offline yang telah dilaksanakan, sebut saja kegiatan BKM (Bakti Karya Mahasiswa) dalam kegiatan tersebut panitia maupun anggota sebagai peserta pun sangat antusias untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

Keterlibatan anggota dalam proses berjalannya organisasi, proses perencanaan, pemantauan dari hasil perencanaan, kinerja fungsionaris, dan lainnya. Partisipasi anggota merupakan satu hal yang dapat mendorong kesuksesan dari suatu organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Mendorong anggota berpartisipasi aktif dalam proses jalannya organisasi merupakan salah satu permasalahan yang harus dicari pemecahannya. Partisipasi anggota merupakan wujud demokrasi dalam organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi di negara kita Indonesia adalah demokrasi perwakilan dimana tidak semua masyarakat atau anggota dapat terlibat dalam suatu kegiatan namun melalui wakil-wakil atau delegasi yang sudah disetujui sebelumnya. Sebagai *stakeholder* dalam suatu organisasi, anggota berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan guna perkembangan organisasi kedepannya.

Fungsionaris UKKI UNESA menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

"...Kalau menurut saya untuk wadah partisipasi anggota dalam kegiatan UKKI cukup luas Cangkupannya, setiap kegiatan pasti melibatkan anggota UKKI baik nanti terkait open recruitment kemudian muktamar, sertijab dan lain sebagainya tetap melibatkan anggota secara keseluruhan..." (Wawancara, 30 Maret 2022)

Partisipasi anggota dalam organisasi UKKI UNESA bisa terbilang aktif, namun ada juga anggota yang kurang aktif, hal ini menjadi wajar dalam sebuah organisasi terbesar di kampus Universitas Negeri Surabaya dengan jumlah ratusan anggota maka tidak memungkinkan seluruh anggota terjun dalam agenda kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh UKKI UNESA memiliki sistem delegasi, yakni perwakilan anggota dalam setiap bidang. Sehingga kekurangannya tidak semua anggota dapat dilibatkan secara langsung dalam setiap kegiatan.

Kesetaraan Antar Warga

Kesetaraan antar warga merupakan nilai dasar yang diperlukan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan antar warga berarti pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa membedakan

suku, agama, ras, dan etnis. Indonesia merupakan negara multikultural sehingga nilai kesetaraan sangat diperlukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan pendapat dari anggota UKKI UNESA Dedy Yusuf

“...Untuk keseluruhan tentu saja Islam, saya kira begitu. Namun, di Islam sendiri memang ada beberapa mazhab atau kepercayaan yang sedikit berbeda dan saya kira kami semua memiliki hak yang sama, dan bisa mempunyai kedudukan yang sama juga...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap anggota memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sama, serta pemberian kesempatan yang sama meskipun terdapat perbedaan. Kesetaraan antar warga dalam konteks negara demokrasi berarti seluruh warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama. Tidak ada pengistimewaan antar warga atau anggota.

Ketua Umum UKKI UNESA menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

“...UKKI adalah miniatur dari kehidupan sosial yang ada di masyarakat sehingga kami tetap tidak membandingkan banding satu dengan yang lain walaupun berbeda beda pemahaman. Jadi faham apa saja di sini memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu Untuk demi dan kembali pada UKKI UNESA...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Di lain sisi, Fungsiaris UKKI UNESA juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

“...Jika terkait kepercayaan religiusitas, alhamdulillah syarat bergabung di UKKI adalah Islam. Selain ikatan tersebut mungkin kepercayaan yang dimaksud berkaitan dengan budaya dan golongan beragama, atau yang lain? Jika demikian, maka mereka tetap mendapatkan kedudukan yang sama. Dan untuk mengemban amanah maka ada tolok ukur sendiri yang diharap dapat menjadi penetralisir golongan di UKKI...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam organisasi besar UKKI UNESA dalam hal religiusitas memang hanya satu yakni Islam, namun di dalamnya masih ada kepercayaan atau ormas lain yang di anut oleh masing-masing anggota, oleh karena itu kesetaraan antar warga dalam hal ini kesetaraan antar anggota. Wujud dari kesetaraan antar anggota adalah setiap anggota memiliki hak yang sama dalam proses berjalannya organisasi baik itu dalam memberikan saran dan kritik terhadap kinerja fungsiaris maupun memberikan pendapat terkait jalannya program kerja yang sudah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan.

Rasa Percaya (*Trust*)

Rasa percaya sangat diperlukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan nilai-nilai

demokrasi, pemerintah bisa kesulitan menjalankan tugas dan agendanya apabila kurangnya kepercayaan dari masyarakat.

Dari hasil wawancara sebelumnya, telah diperoleh beberapa informasi terkait dengan rasa percaya yang ada dalam organisasi UKKI UNESA, berikut hasil kutipan wawancara dari Anggota UKKI UNESA

“...Saya kira demikian meskipun ada beberapa yang memang kurang kompeten, tapi hal tersebut masih bisa diperbaiki. Karena kita juga ga semua sudah pernah berorganisasi jadi ada yang baru belajar ada yang mau mengajari.” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Ketua Umum UKKI UNESA Imron Zainudin L menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

“...Iya, kami sangat percaya anggota dari mulai *oprec* hingga menjadi pengurus ingin mengembangkan potensi potensi yang ada di dirinya dan ingin menjadikan UKKI tempat untuk berproses dalam kepemimpinan...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Fungsiaris UKKI UNESA Uci Vebia P, menyatakan pendapat nya bahwa :

“...Kepercayaan ditumbuhkan dalam diri kami, baik saat menjadi anggota maupun setelah mengemban amanah dalam fungsiaris...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dari kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam organisasi UKKI UNESA dimana dari sekian banyak anggota tentu memiliki kepercayaan satu sama lain baik oleh anggota ke anggota lain maupun dari anggota ke fungsiaris. Rasa percaya akan tumbuh sendirinya seiring dengan proses jalannya kinerja fungsiaris maupun anggota. Anggota memiliki kepercayaan kepada fungsiaris untuk mengatur dan merencanakan program kerja. Fungsiaris juga menaruh rasa percaya kepada anggota untuk menjalankan program kerja yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya. Rasa percaya ini wajib ditumbuhkan oleh masing-masing individu yang ada di dalam organisasi, sebab dalam rasa percaya ini akan memberi kepercayaan terhadap diri anggota untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tanpa adanya rasa takut.

Kerja Sama

Kerja sama merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, kerja sama tim diperlukan dalam suatu organisasi agar mampu mengarahkan serta mengembangkan organisasi sesuai visi, misi, dan tujuan secara bersama-sama bukan bertumpu pada pemimpin. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan, dan dalam meraih tujuan diperlukan kemampuan kerja sama oleh anggota dan fungsiaris

Dari pihak Anggota UKKI UNESA menyampaikan pendapatnya sebagai berikut

“...Tentunya bisa menjalankan kerja sama karena dalam program kerja ini kan juga pastinya membutuhkan anggota dalam pelaksanaannya dan fungsionaris ini juga mengatur terkait misal dokumen-dokumen atau apa yang diperlukan, izin yang mengurus juga fungsionaris. Memang harus kerja sama biar proker-prokernya itu berjalan dengan baik...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dari kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota dan fungsionaris bisa menjalankan kerja sama dengan baik, anggota diperlukan dalam pelaksanaan organisasi sedangkan fungsionaris diperlukan dalam pengurusan terkait dokumen. Antara anggota dan fungsionaris memang perlu kerja sama agar proker yang sudah direncanakan berjalan dengan baik.

Kerja sama dalam suatu organisasi sangatlah penting, karena dalam organisasi terdapat juga fungsi Manajemen yakni *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Artinya tidak semua orang dalam suatu organisasi harus berjalan bersama-sama dan maju berbarengan. Tentu ada yang mengontrol, perencanaan, pengorganisasian dan perhitungan. Oleh karena itu, ada istilah tim. Kerja sama tim sangat diperlukan guna perkembangan organisasi. Dari pandangan Ketua Umum UKKI UNESA adalah sebagai berikut :

“...Kalau dari saya pribadi semua fungsionaris dari seluruh pengurus inti, pengurus wilayah dan pelaksana harian atau KABID dan WAKABID sudah berkoordinasi bekerja sama dengan anggota, buktinya ketika kita melaksanakan kegiatan di bidang seperti kegiatan yang ada di kajian, kegiatan rutinna yang sudah diagendakan dan dijadwalkan di setiap bidang maupun kegiatan kegiatan di wilayah masing masing...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Di lain pihak, Uci Vebia P selaku Fungsionaris juga memberikan pendapatnya sebagai berikut

“...Ya menurut saya peran fungsionaris telah menjalin kerja sama dengan anggota cukup baik karena memang ketika ada suatu kegiatan fungsionaris itu selalu selalu *monitoring* dan selalu *sterring commite* itu selalu berusaha melakukan pendekatan pada anggota sehingga selalu terjalin komunikasi dia arah seperti itu...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam organisasi UKKI UNESA terdapat fungsionaris yang memiliki bagian perencanaan, memonitor, dan ada anggota yang berperan sebagai pelaksana. Dalam hal ini diperlukan kerja sama yang baik antar kedua belah pihak. Program kerja tidak akan berjalan apabila yang maju hanya salah satu pihak saja.

Ketua Umum UKKI UNESA menjelaskan sebagai berikut.

“...Untuk kerja sama di dalam internal kampus sejauh ini kami sudah melakukan kerja sama dengan UKM peduli kemanusiaan yaitu pada acara mabar (ramadhan berbagai with binjar) merupakan bidang yang ada di wilayah lidah wetan, kerja sama ini di inisiasi dengan program kerja yang sama yakni buka bersama dan santun kepada anak yatim antar kedua UKM Kerja sama yang di dahului kemunikasi antar ketua UKM kemudian dilanjutkan dengan komunitas intens dengan ketua pelaksana guna menyelaraskan acara demi menjalin kerja sama yang saling imbang di antara UKM. Untuk kerja sama external kampus sejauh ini kami sudah melakukan kerjasama dengan beberapa UKM UKKI di kampus lain dan juga lembaga. Biasanya collabs UKKI Unesa dgn kampus lain itu ketika melaksanakan proker stuba (studi banding). Seperti ITB, UGM, dan Pens. Untuk kerjasama dengan lembaga lain contohnya dengan HI (Human initiative). Yakni ketika penggalangan dana ketika terjadi bencana di beberapa kota seperti gempa palu, banjir malang, dll. Nanti sepenuhnya dari hasil penggalangan dalam kita salurkan ke keluarga yg terdampak melalui lembaga HI. Ada juga anggota UKKI yg bisa ikut turun lapangan secara langsung, contohnya ketika erupsi Semeru tahun kemarin. Ada anggota yg ikut terjun untuk membantu warga yg terdampak, seperti evakuasi jenazah, menyalurkan sembako, dll...” (Wawancara, 30 Maret 2022)

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya UKKI UNESA telah menjalin kerjasama baik dengan organisasi Internal maupun organisasi Eksternal UNESA.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi pancasila terhadap proses berjalannya organisasi UKKI Universitas Negeri Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik melalui beberapa program kerja guna menciptakan kehidupan organisasi yang lebih demokratis. Selain itu, penerapan nilai-nilai demokrasi pancasila guna menjadikan anggota memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

Wujud dari implementasi nilai-nilai demokrasi tersebut terdapat berbagai macam, antara lain: 1) Setiap anggota memiliki kebebasan dalam menyatakan pendapat, namun arti bebas disini bukan bebas sebebasnya, terdapat *steps* agar lebih terstruktur; 2) Setiap anggota UKKI UNESA memiliki kesetaraan dan hak yang sama meskipun memiliki perbedaan pandangan antar satu dengan yang lainnya; 3) UKKI UNESA menerapkan sistem delegasi atau perwakilan, organisasi ini memiliki jumlah anggota

yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan jika melibatkan langsung seluruh anggota dalam suatu forum/rapat; 4) Antara fungsionaris dan anggota memiliki rasa saling percaya satu sama lain dalam menjalankan program kerja; 5) Kerja sama dalam organisasi sampai saat ini masih berjalan baik terbukti dengan kesuksesan program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, selain itu juga UKKI UNESA telah melaksanakan kerjasama baik dalam internal kampus maupun dengan eksternal luar kampus.

Saran

Merujuk pada hasil penelitian terdapat beberapa saran sebagai berikut: (1) Bagi anggota, nilai-nilai demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, rasa percaya (*trust*), dan kerja sama harus semakin ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten serta terus menerus agar hasil yang dicapai tidak hanya berhenti pada satu generasi, kemudian bagi anggota UKKI diharapkan mampu bersikap kritis dan aktif untuk mengevaluasi kinerja fungsionaris dan mampu berpartisipasi aktif guna kesuksesan program kerja yang telah dilaksanakan; (2) Bagi fungsionaris, dalam perencanaan harus mampu mengkoordinasikan keseluruhan anggota guna meningkatkan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berpartisipasi melalui forum; (3) Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasanah ilmu sebagai rujukan dalam meningkatkan nilai demokrasi.

Berdasarkan pada hasil penelitian terkait dengan implementasi nilai-nilai demokrasi pancasila pada organisasi UKKI Universitas Negeri Surabaya, semoga dapat terlaksana lebih maksimal, baik dalam forum maupun dalam program kerja UKKI secara luas, diharapkan mampu menjadikan bahan renungan untuk pengurus dan anggota pada periode berikutnya. Fungsionaris maupun pemimpin organisasi wajib memantau kinerja para anggotanya, dengan jumlah anggota yang banyak tentu tidak bisa memaksimalkan implementasi nilai-nilai demokrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, organisasi harus memaksimalkan kualitas anggota daripada kuantitas.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung selama proses pengerjaan artikel. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan informasi terkait dengan implementasi nilai-nilai demokrasi pancasila di UKM Unit Kegiatan Kerohanian Islam Universitas Negeri Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. 2014. *Islam dan Demokrasi*.
- A Dahl, Robert. 2020. *On Democracy*. Yale University
- Aulawi, A., & Srinawati, S. 2019. *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pengambilan Keputusan Organisasi Untuk Meningkatkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Di SMK Darus Syifa Kota Cilegon*. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, 2(1), 38-50.
- Cahyono, Habib. 2019. *peran mahasiswa di masyarakat*. Jurnal pengabdian masyarakat setiabudhi vol.1 No.1 November 2019
- Candra Hermawan dan Iyep. *Menggali nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal sunda sebagai pengembangan materi pembelajaran PKn di sekolah*
- Draft Mukhtar XXXIII Unit Kegiatan Kerohanian Islam UNESA
- Gandamana. 2017. *memaknai demokrasi pancasila*. Jurnal Unimed. Vol 7, No 1 (2017)
- Kosasih. 2016. *Peranan Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pengembangan Civic Skills Mahasiswa*. Jurnal pendidikan ilmu sosial, vol.25, No.2 edisi desember 2016.
- Esposito, J. L., Esposito, V., & Voll, J. O. 1996. *Islam and Democracy*. Oxford University Press on Demand.
- Muhammad Hakiki, Kiki. 2016 *Islam dan demokrasi: pandangan intelektual muslim dan penerapannya di Indonesia*. Wawasan: jurnal ilmiah agama dan sosial budaya 1, 1 (januari 2016)
- Ningsih, C. S., Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Prasetya, W. I. 2021. *Hak Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit dan Memburuk*. Jurnal Syntax Fusion, 1(2), 25-39
- Ongku Hsb, Mara. 2021. *HAM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UUD 1945*.
- Potrafke, N. 2012. *Islam and Democracy*. Public Choice, 151 (1), 185-192
- Rosalvallon, Pierre., *The History of the word Democracy in France*, dalam journal of Democracy, Volume 6.4 Tahun 1995
- Rahardjo, M. 2017. *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*.
- Saleh, S. 2017. *Analisis data kualitatif*.
- Sari,retna. 2013. *studi aktivitas pengguna gazebo fakultas pendidikan teknologi dan kejuruan*. Universitas pendidikan Indonesia.
- Sorensen, Georg., 2014. *demokrasi dan demokratisasi: proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014)

- Strauss, A., & Corbin, J. 2003. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sukitman, Tri. 2016. *internalisasi pendidikan nilai dalam pembelajaran (upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter)*. Jurnal pendidikan sekolah dasar Vol. 2, No. 2 Agustus 2016.
- Syafriadi. 2017. *pelaksanaan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. UIR Law Review volume 01, Nomor 01, April 2017
- Syaiful arif, *demokrasi*, yogyakarta: pustaka belajar 2012, hal 7
- Widyarsono, toto dkk. 2011. *pengumpulan sumber sejarah lisan: gerakan mahasiswa 1966 dan 1988*. jakarta. Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif direktorat jenderal sejarah dan purbakala direktorat nilai sejarah.